

### BAB III

## KEBIJAKAN LUAR NEGERI PRESIDEN MEGAWATI, DAN REAKSI AMERIKA SERIKAT

Dalam konteks besarnya perhatian dari pihak AS/Barat terutama menyangkut kondisi domestik pasca reformasi (1999), maka pada bab ini akan dibahas lebih jauh yaitu; bagaimana selanjutnya prospek dukungan dan reaksi AS– serta respon atas kebijakan luar negeri Presiden Megawati baik di tingkat internal maupun eksternal.

Dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 2001, Presiden Megawati menekankan bahwa terdapat 6 program dari kabinetnya yang dinamakan Kabinet Gotong Royong, salah satu yang mendapat sorotan penting adalah implementasi politik luar negeri sebagai berikut; *‘conducting the free and active foreign policy, recovering state’s and nation’s dignity and returning the trust of foreign countries, including international donor institutions and investors, to the government.’*<sup>1</sup> Presiden Megawati juga menambahkan bahwa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang intinya *‘recovering state’s and nation’s dignity and returning the trust of foreign countries’*, harus pula memerhatikan hal-hal sebagai berikut; *‘recovery and the efforts to maintain the stability of our national security and defence. We do need an effective, highly discipline system as well as security apparatus, which are under the control of the government but remain inspired by the people’s aspiration’.*<sup>2</sup>

Perihal fokus utama politik luar negeri Indonesia yang menekankan pada ‘perbaikan imej bangsa dan negara dan mengembalikan kepercayaan pihak dunia luar, maka unsur stabilitas keamanan di bawah pengawasan

---

<sup>1</sup> Lihat <http://www://UNIPA-ANU-UNCEN PapuaWeb Project, 2002-05>, diakses 15 Juli 2009. ‘Lima poin lainnya yang menjadi program utama Kabinet Gotong Royong di bawah Pemerintahan Presiden Megawati; 1. *Maintaining the unity of the nation in the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.* 2. *Continuing the process of reforms and democratization in all aspects of national life through clearer framework, direction and agenda, while improving the respect for human rights;* 3. *Normalizing economic life and strengthening the basis for people’s economy;* 4. *Implementing law enforcement consistently, creating feeling of safe and secure in people’s life, eradicating corruption, collusion and nepotism;* and 5. *Preparing safe, orderly, secret and direct general election of 2004’.*

<sup>2</sup> *Ibid.*

pemerintah, dengan tetap mengutamakan dan memperhatikan aspirasi masyarakat, dengan 3 kata kunci penting; keamanan, pemerintah, dan masyarakat. Hal-hal tersebut dapat dikatakan merupakan hal-hal yang menjadi ciri khas pemerintahan Presiden Megawati di bandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Lebih jauh Presiden Megawati juga melihat bahwa reformasi nasional dan penciptaan situasi masyarakat yang lebih demokratis memerlukan peran TNI yang dinamis, siap, dan mampu melakukan penyesuaian dengan berbagai perubahan yang ada. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Megawati sebagai berikut; *'The TNI has pledged its commitment to continue carrying out its internal reforms by way of taking concrete measures to position itself professionally and functionally as the instrument of state defense and to uphold the enforcement of democracy as well as to abide by the law and to respect human rights'*.<sup>3</sup>

Secara lebih rinci dan kaitannya dengan perlunya wajah baru TNI dan Polri di era pemerintahan Presiden Megawati, dan respon terhadap sikap AS dan Barat yang agak skeptis yaitu sebagai berikut; *'We also consistently able to set apart the National Police from the TNI – and the TNI must focus its tasks on defending the territorial integrity, while the police would concentrate more on creating and maintaining security and feeling fo secure among the people at large.'*<sup>4</sup> Dari hal-hal yang digaris-bawahi oleh pemerintahan Presiden Megawati menyangkut pemisahan tugas antara TNI dan Polri, ini mengindikasikan bahwa hubungan masyarakat sipil lebih dominan dan lebih terkait langsung dengan peran Polri sebagai wadah pengaman utamanya.

Selanjutnya dalam kaitan itu, rakyat umumnya diarahkan untuk lebih berorientasi pada Polri, dan tidak perlu langsung berhubungan dengan aparat TNI dalam hal isu-isu *menyangkut* keamanan atas dirinya, keluaraganya, dan lingkungannya. Pola hubungan yang demikian menunjukkan bahwa Presiden Megawati konsisten perlunya penataan hubungan sipil-militer yang baru, berbeda dengan masa sebelumnya (terutama di era Orde Baru, dan pasca krisis 1999-2000). Hal tersebut juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Presiden Megawati. Karena suatu bentuk penyesuaian terhadap

---

<sup>3</sup> Lihat <http://www.UNIPA-ANU-UNCEN>, *Loc. Cit.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

hal-hal yang baru tidak mudah diimplementasikan dalam waktu singkat dan diperlukan sosialisasi serta penyesuaian yang bersifat timbal balik. Namun satu hal telah berani ditunjukkan oleh pemerintahan Presiden Megawati; bahwa kalau di AS hubungan sipil dan polisi menjadi ‘kendali keamanan’ bagi masyarakat sipil umumnya, maka hal tersebut juga menjadi perhatian Indonesia. Intinya, Indonesia pun dapat melakukan sesuatu yang penting bagi hubungan sipil-militer, dan terjadi AS. Menunjang peran baru TNI maupun Polri tersebut, memang pemerintahan Presiden Megawati tampaknya cukup sibuk, karena berbagai ketentuan maupun perundangan mau tidak mau harus pula diwujudkan, di samping soal-soal yang terkait dengan logistik persenjataan yang perlu diperbaharui (mengingat banyak komponen Alutsista<sup>5</sup> yang tidak layak lagi untuk dipertahankan). Dalam hal yang terakhir ini, merupakan hal yang cukup sulit bagi Indonesia untuk menyakinkan pihak-pihak di AS (para anggota Kongres maupun Senat) yang sejak kasus Peristiwa Berdarah di Dilli (1999) ‘makin memperketat’ embargo senjata terhadap Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, bagi pemerintahan Presiden Megawati bukanlah hal yang mudah, karena di samping harus menyakinkan pihak-pihak di AS – Indonesia juga tidak luput dari berbagai kasus pelanggaran HAM dan konflik di wilayah di Indonesia Timur (Poso, Palu, Maluku Utara, Papua Barat), dan wilayah Aceh. Ini berarti pula Presiden Megawati menghadapi tantangan dalam bentuk 2 front *sekaligus* yaitu; konflik-konflik etnis di tingkat domestik yang meningkat pada pasca reformasi, dan tantangan diplomasi terhadap AS yang tidak ringan, di mana tidak saja harus melakukan respon tapi juga harus merebut simpati terutama pihak-pihak (para anggota Kongres dan Senat) di AS.

Diane Farsetta mengakui bahwa tidak mudah bagi Indonesia untuk memperoleh teman dan pengaruh yang besar atas politik luar negeri Amerika Serikat. Kasus-kasus ‘*human rights violations*’ di berbagai propinsi (termasuk serangan terhadap anggota maupun simpatisan Gerakan Aceh Merdeka – GAM), telah mendapat sorotan maupun kecaman dari Amnesti Internasional

---

<sup>5</sup> Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan).

maupun para NGO pembela HAM di AS.<sup>6</sup> Mereka umumnya menyimpulkan bahwa *'the Indonesian security forces bear primary responsibility for these human right violations, although for GAM cases – they have also committed serious human rights abuses.'*<sup>7</sup> Hal kedua yang juga masalah bagi diplomasi Indonesia tersebut, juga diakui oleh mantan Menteri Informasi dan Komunikasi Syamsul Muarif bahwa, *'we are weak in international public relations, and because of that, reports by foreign media are often damaging'*.<sup>8</sup> Karena itulah Diane menilai bahwa isolasi yang terlalu berlebihan terhadap kaitan militer Indonesia di dunia umumnya dan soal-soal HAM, menyebabkan pemerintahan Presiden Megawati perlu melakukan tindakan serius yaitu; *'to clean up its image, the Indonesian government has turned to U.S. – based Public Relations and lobbying firms.'*<sup>9</sup>

Hal-hal tersebut ternyata tidak hanya dilakukan di era pemerintahan Presiden Megawati, tapi sudah dilakukan sejak tahun 1991. Namun, upaya pendekatan dan lobi serius tersebut makin gencar di era pemerintahan Presiden Megawati (2001), di mana Indonesia's Sekar Mahoni Sakti Foundation hired Advantage Associates, *to create a positive view of Indonesian with the U.S. Congress, Administration, and Department of Defence, and the main goal was to lift an embargo on spare parts for the C-130 military aircraft.*<sup>10</sup>

Oleh sebab itulah upaya reformasi hubungan sipil-militer semasa pemerintahan Presiden Megawati tidak hanya penting bagi konteks politik domestik, tapi hal itu menjadi basis utama agar imej militer Indonesia di mata AS maupun negara-negara Barat lainnya makin baik. *Menindak-lanjuti* upaya tersebut, Presiden Megawati mengunjungi AS seminggu setelah peristiwa *'nine-eleven'* (11 September 2001), dan beliau merupakan pimpinan negara berkembang pertama yang bertemu dengan Presiden George Bush. Begitu pula berbagai transaksi lobi dan pekerjaan *public relations* dengan mitra AS

---

<sup>6</sup> Common Dream. Org. Com. Diane Farsetta, *'How Indonesi Wins Friends and Influences U.S. Foreign Policy*, 5 Pebruari 2005, diakses 16 Mei 2009.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Common Dream. Org. Com. *Loc. Cit.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

terus dilakukan sampai 2004 (termasuk dengan bekas senator AS, Bob Dole, *Alston and Bird special counsel*).<sup>11</sup> Upaya berbagai pihak di era Megawati tersebut akhirnya berbuah hasil, yaitu Collin Powell pada Januari 2005; *'offered Indonesia spare parts for C-130 military aircraft'*.<sup>12</sup> Kendatipun tawaran AS tersebut muncul setelah terjadinya tsunami dahsyat di Aceh, namun pihak-pihak LSM pemerhati HAM di AS maupun dunia umumnya tetap mengecam kebijakan Powell tersebut (*the tsunami must not be used as an excuse to sweep away U.S. Military restriction on Indonesia*).<sup>13</sup> Alhasil dari kasus C-130 tersebut upaya diplomasi semasa pemerintahan Presiden Megawati tidak langsung berbuah hasil, tapi justru baru terkabul setelah Megawati tidak lagi memerintah (Januari 2005).

Di samping kunjungan Presiden Megawati ke Washington pada pertengahan September 2001, Presiden George Bush Jr. Kembali bertemu dengan kepala negara Republik Indonesia tersebut pada 22 Oktober 2003 di Bali International airport, Bali Denpasar. Pertemuan tersebut kembali melahirkan *Joint Press Availability* antara kedua kepala negara tersebut. Presiden Megawati kembali menekankan *beberapa* poin penting dalam pembicaraan yang bersifat bilateral antara Indonesia-Amerika Serikat Isu-isu yang penting dan mendapatkan perhatian bersama yaitu menyangkut *counterterrorism, political democratization – process in Indonesia; military cooperation; territorial integrity and national unity of the unitary state of the republic of Indonesia, renunciation to any terrorist movement in the country; and the U.S. support...*<sup>14</sup>

Menanggapi pernyataan Presiden Megawati tersebut, Presiden George Bush tampaknya tidak keberatan *dengan* hal-hal yang menjadi perhatian Indonesia tersebut, dan secara umum dapat dikatakan terdapat kesamaan pandangan antar kedua negara dan atas poin-poin tersebut. Ini merupakan pertanda penting bahwa hubungan baik dan erat antar kedua negara perlu dilandasai oleh pandangan yang sama menyangkut respon terhadap teror,

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> [http://www. The Embassy of the Republic of Indonesia, Washington D.C., USA, 2008](http://www.TheEmbassyoftheRepublicofIndonesia,WashingtonD.C.,USA,2008). Diakses pada 20 Juli 2009.

kerjasama militer, proses kehidupan politik yang demokratis, dan lain-lain. Dalam tanggapannya, Presiden George Bush Jr juga menekankan hal-hal sebagai berikut; *'Terrorists who claim Islam as their inspiration defile one of the world's brutality has no place in any religious tradition, and must find no home in Indonesia. President Megawati has confronted this evil directly. She was one of the leader that stand with me after September the 11th. Under her leadership, Indonesia was finding dangerous killers, and America appreciates Indonesia's strong and serious reaction.....'*<sup>15</sup>

Bahkan Presiden George Bush lebih jauh menambahkan bahwa khususnya terkait dengan kemajuan reformasi dan dalam konteks hubungan sipil-militer, termasuk reformasi di tubuh TNI sebagai berikut; *'Indonesians have made good progress over the last five years in strengthening and in building the civil institutions that sustain freedom....'*<sup>16</sup> Hal tersebut mengindikasikan bahwa baik pemerintah AS di bawah Presiden George Bush Jr dan Presiden Megawati sudah saling mengerti dan saling menunjang akan perlunya kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang. Kendatipun Indonesia adalah penduduk Muslim terbesar di dunia dan negara nomor tiga yang menganut sistem politik demokrasi, namun kesamaan pandang dalam hal penanganan soal-soal teroris dan keamanan dalam arti luas (*strengthening and building the civil institutions*), telah cukup memberikan dampak positif. Ini berarti bahwa pemerintahan Presiden George Bush Jr makin yakin, bahwa Islam, demokrasi, dan teroris bukan menjadi prioritas asumsi yang saling berhubungan dan tumbuh subur di Indonesia. Teroris memang masih ada di bumi Indonesia, namun pemimpin seperti Presiden Megawati tetap yakin dan konsisten bahwa Indonesia tidak pernah mau berkompromi dengan para teroris. Hal-hal tersebut merupakan makna penting bagi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat pasca peristiwa *'nine-eleven'*.

Pemerintahan Presiden George Bush Jr tampaknya cukup memahami bahwa posisi Indonesia yang strategis, karena merupakan penduduk Muslim terbesar dan menganut sistem politik demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan meningkatnya peran politik organisasi partai politik Islam pasca Orde Baru

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

(1998), di tambah masih merebaknya kelompok-kelompok Islam radikal yang terkait dengan organisasi Al-Qaeda – maka Amerika tampaknya berkepentingan dengan terwujudnya Indonesia yang ‘demokratis dan didukung dengan militer yang profesional’. Atas dasar pertimbangan utama itulah, kunjungan Presiden Megawati pada minggu ketiga September 2001, telah membuahkan hasil dengan disetujuinya prakarsa pemerintahan Presiden Bush Jr yang mengalokasikan dana bantuan dalam bentuk kombinasi atau campuran antar ‘*aid and trade initiatives combined with a strengthening of bilateral military ties*’.<sup>17</sup>

Komitmen bantuan Presiden George Bush Jr direalisasikan pada tahun fiskal 2002 (satu tahun setelah kunjungan Presiden Megawati, 2001), meliputi 130 juta dollar AS terutama ditujukan untuk *judicial reform*, 10 juta dollar AS untuk *internally displace peoples*, 5 juta dollar AS untuk rekonstruksi dan rekonsiliasi propinsi Aceh, 2 juta dollar AS untuk biaya reprivatisasi pengungsi Timor Timur, dan 10 juta dollar AS untuk pelatihan SDM Polri.<sup>18</sup> Sebagai tambahan, pemerintahan Presiden George Bush juga menyediakan dana sejumlah 100 juta dollar AS yang diatur dibawah *General System of Preferences* (GSP) dengan memberikan akses 11 produk tambahan dengan ijin tanpa pajak (*duty-free access*) ke pasar AS.<sup>19</sup> Akhirnya, President George Bush Jr juga mengumumkan bahwa tiga agen perdagangan uang, antara lain *the Export-Import Bank*, *the Overseas Private Investment Corporation*, dan *the U.S. Trade and Development Agency* diijinkan untuk melakukan kerjasama dan inisiatif di bidang perdagangan dan keuangan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di Indonesia dengan dana sejumlah 400 juta dollar AS (*promote trade and investment within Indonesia, especially in the Indonesian oil and gas sector*).<sup>20</sup>

Khusus menyangkut bantuan untuk *judicial review* yang menjadi perhatian pemerintahan Presiden George Bush Jr, disebabkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asia Foundation, bahwa intinya lebih dari 50% total

---

<sup>17</sup> John Gershman ([john@irc-online.org](mailto:john@irc-online.org)), ‘*Fighting Terrorism, Undermining Democracy in Indonesia*, April 2003, diakses pada 16 Juli 2009.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> John Gershman ([john@irc-online.org](mailto:john@irc-online.org)), *Loc. Cit.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

penduduk dewasa Indonesia; *'can't provide a single example of a right to which they are entitled'*.<sup>21</sup> Juga mengapa Polri mendapat perhatian penting, karena; *'more than 60% of respondents said police were apt to demand a bribe to take action over anything, while 30%-35% thought the courts were only for the wealthy and were risky places to seek justice'*.<sup>22</sup> Pemerintahan Presiden George Bush menyadari kalau hal-hal yang terkait dengan *judicial review* tidak dilakukan pembaharuan ataupun ditata kembali, maka ini akan mengembalikan pada situasi Indonesia pada masa lalu, misalnya meremehkan dan tidak respek pada penegakkan hukum, termasuk pula soal masalah-masalah HAM, dan mengembalikan bangkitnya peran pihak-pihak aparat militer tertentu yang bermain di belakang layar. Demokrasi bagi pemerintahan Presiden George Bush Jr tampaknya menginginkan Indonesia harus mampu keluar dari dilema demokrasi yang seperti itu (*attempting to institutionalize a fragile democracy*).<sup>23</sup>

Namun dalam menghadapi musuh bersama Indonesia-Amerika Serikat yaitu melakukan *'war on terror'*, pemerintahan President George Bush Jr juga memprioritaskan hubungan-hubungan yang bersifat khusus dengan para petinggi TNI dan Polri termasuk para jenderal tertentu yang dianggap berpengaruh. Peristiwa Bom Bali I dan II memperkuat pola hubungan tersebut, dan bersifat tertutup/rahasia.<sup>24</sup> Hal tersebut atau konteks peristiwa Bom Bali I maupun II tampaknya tanpa disadari *'cukup menguntungkan'* bagi keinginan Presiden Megawati yang ingin melakukan reformasi TNI/Polri dan penataan hubungan sipil-militer yang mau tidak mau mendapat perhatian serius bagi AS khususnya.

Bahkan lebih jauh pemerintahan Presiden George Bush Jr tidak menghiraukan hal-hal<sup>25</sup> yang membatasi ikatan hubungan militer bilateral Indonesia-Amerika Serikat, dan baik Indonesia maupun Amerika sepakat atas

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> John Gershman ([john@irc-online.org](mailto:john@irc-online.org)), *'Moves toward strengthening U.S.-Indonesian military ties were opposed by some key Congressional leaders and human rights groups because of ongoing human rights violations by the Indonesian military, and the continuing impunity of high-ranking Indonesian military officials for their complicity in human rights violations in East Timor and in various parts of Indonesia'*.

hal-hal sebagai berikut; *'Expand modest contacts and resume regular meetings between the U.S. and Indonesian militaries to support Indonesia's efforts at military reform and professionalization. Such activities include Indonesian participation in a variety of conferences, multilateral exercises, subject matter exchanges on issues such as military reform, military law, investigations, budgeting and budget transparency, as well as humanitarian assistance and joint relief operations'*.<sup>26</sup>

Tampaknya hal-hal yang menjadi penekanan dan perhatian pemerintahan Presiden George Bush Jr terhadap peningkatan kerjasama militernya dengan Indonesia lebih bersifat jangka panjang. Seoptimal mungkin Amerika Serikat tidak hanya menekankan kerjasama militernya dengan Indonesia yang bersifat teknis saja. Namun Amerika juga sadar beberapa lingkaran konsentrik yang berupaya memperkuat tumbuhnya militer yang profesional dan kehidupan demokrasi yang kokoh berikut lembaganya, agaknya harus ditopang dengan beberapa lingkaran konsentrik kerjasama yang strategis, dinamis, dan bernuansa jangka panjang. Dapat diperhatikan mulai dari lingkaran konsentrik yang utama menyangkut sumber daya manusianya menjadi poin utama. Selanjutnya adalah poin kedua yang menekankan aspek perlunya peran sipil ikut serta dan berpartisipasi dalam isu keamanan dan pertahanan Indonesia. Demikian halnya dengan poin-poin berikutnya yaitu pada perhatian adanya budget yang dapat mendidik pihak-pihak sipil Indonesia menyangkut masalah-masalah pertahanan melalui *'Expanded International Military Education and Training'*. Semua hal tersebut secara langsung maupun tidak, Amerika Serikat khususnya di era Presiden George Bush Jr mengharapkan bahwa Indonesia tidak hanya sekedar tumbuh sebagai kekuatan demokrasi di Asia, namun harus kokoh dan ditunjang oleh prinsip kehidupan militer yang modern dan profesional, serta dibawah pengawasan pihak-pihak sipil (*producing an Indonesian military that meets the standards*

---

<sup>26</sup> *Ibid, Loc. Cit.* Hal-hal lainnya sebagai berikut; *Establish a bilateral Security Dialogue under the supervision of the two countries respective civilian ministers of defence in order to promote 'increased civilian participation in Indonesian defense and security issues. Further, ask Congress for 400.000 US\$ to educate Indonesian civilian on defense matters through the Expanded International Military Education and training. Finally, lift the embargo on commercial sales of nonlethal defense articles for Indonesia, with individual application to be reviewed on a case by case basis, in line with standard practice in America'*.

*of a modern, professional force under civilian control or promoting long-term stability in Indonesia).*<sup>27</sup>

### 3.1 Keterkaitan Isu Ham dan Bantuan Militer AS

Dalam kutipan *pembicaraan* dengan Kautsar Ketua FPDR (Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh ) dinyatakan bahwa

” Kebijakan Amerika untuk mencabut embargo senjata atas Indonesia dinilai Kautsar ketua KSO Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh ( FPDR ) menilai Yang pertama Amerika Serikat menutup mata terhadap pelanggaran HAM di Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan dan daerah-daerah lain yang berada dibawah Indonesia. Amerika menarik embargonya karena; yang pertama Amerika sedang ingin dukungan Indonesia sebagai negara muslim terbesar untuk mendukung invasi militer mereka ke Afganistan. .<sup>28</sup> ”

Dalam wawancara tersebut dikatakan bahwa pencabutan embargo ini pasti ada keuntungan bagi negara AS,

” Sedangkan keuntungannya AS secara politis, inikan ada tukar-menukar, Amerika sedang ditimpa musibah sedang kebingungan mencari jalan keluar musibah yang sedang mereka alami sekarang sehingga mereka kemudian emosional mereka ingin melakukan invasi militer ke Afganistan sebagai sebuah tindakan yang sangat ceroboh secara politik dan kemudian untuk tindakan invasi ini mendapat sebuah himbuan dari masyarakat dunia. Artinya tidak semua masyarakat dunia sepakat dengan upaya penyelesaian musibah di Amerika dengan invasi besar-besaran ke Afganistan. Terutama hambaatan tersebut dari negara-negara Islam. Indonesia sebagai negara ummat Islam terbesar di dunia itu, Amerika sangat mengharapkan dukungan diplomatik dan politik yang bisa diberikan Indonesia kepada Amerika untuk melegalkan invasi tersebut.<sup>29</sup> ”

Sedangkan Keuntungan pencabutan bagi negara Indonesia adalah

”Indonesia sebagai negara yang sedang terombang-ambing sangat banyak berharap dari Amerika, yang pertama itu embargo militer selama partai demokrat itu berkuasa dicabut selama dua periode. Itu memberikan memberikan embargo persenjataan dan Indonesia kalang-kabut dalam persoalan persenjataannya. Yang kedua, kemudian persoalan bantuan ekonomi IMF, WB dan tidak hanya itu kompensasi politik yang diberikan Amerika atas integritas RI, itu secara politik yang diinginkan Indonesia dan juga bantuan-bantuan lainnya. Selain investasi

<sup>27</sup> John Gershman ([john@irc-online.org](mailto:john@irc-online.org), *Loc., Cit.*

<sup>28</sup> Kutipan dari <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2002/01/20/0000.html> diakses pada tanggal 12 Desember 2009 pukul 22.30.

<sup>29</sup> Ibid

ekonomi, jadi mereka ingin pengusaha-pengusaha Amerika yang menanam investasinya disini dan juga Amerika memberikan \$ 10juta bagi pengungsi di maluku dan \$ 5 juta untuk Aceh untuk upaya rekonsiliasi dan pembangunan sekolah serta infrastruktur lainnya dan \$ 130 juta untuk anggaran Indonesia 2002 membantu Indonesia dalam upaya reformasi hukum dan peradilan. (itu ada di SI) Jumlahtersebut secara keuangan saja, secara politik mengakui NKRI dan kemudian embargo senjata akan dicabut.<sup>30</sup>”

Bantuan pemerintahan Presiden George Bush Jr pada tahun 2002 tersebut, bukanlah berarti bahwa AS telah memulihkan hubungan militernya dengan Indonesia secara penuh. Masih ada beberapa indikator penting menyangkut isu-isu sekitar HAM yang perlu mendapat perhatian pemerintah Indonesia. Dalam hal itu konteks penyelesaian masalah Timor Timur menjadi salah satu agenda penting, dan Pemerintahan George Bush Jr akan mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dicapai Indonesia dalam pengusutan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan penegakan HAM secara umum.<sup>31</sup>

Lebih jauh Pemerintahan Presiden Megawati tampaknya sadar bahwa isu HAM dan kaitannya dengan dukungan kerjasama militer AS-Indonesia, jangan sampai apa yang dilakukan di tanah air hanya sekedar memuaskan pihak AS. Tapi hal-hal tersebut harus sesuai dengan tuntutan rakyat yang sesungguhnya, maksudnya Indonesia tidak perlu bersandiwara hanya menyenangkan pihak asing, dan ternyata isu HAM tetap menjadi tantangan bagi pihak TNI.<sup>32</sup>

Ditambahkan pula bahwa keinginan ‘mereka-mereka’ (para anggota Senat dan Kongres di Amerika), sebenarnya bukanlah mencari-cari kelemahan yang menyangkut kebijakan pemerintah Indonesia selama ini menyangkut HAM dan demokrasi tersebut. Hal ini tidak lain setelah berakhirnya era Perang Dingin, Pemerintah Amerika Serikat memang menekankan isu HAM dan demokrasi yang menjadi beban penting dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang umumnya. Perubahan dalam hal itu dilakukan

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> ‘Pemulihan Kerja Sama Militer RI-AS Tergantung Penyelesaian Masalah Timtim’, *Kompas Online*, 15 Agustus 2001.

<sup>32</sup> *Ibid.*

oleh Korea Selatan maupun Taiwan – yang prinsipnya kebijakan politik domestik mereka amat memperhatikan isu HAM dan penegakan demokrasi. Indonesia sendiri menunjukkan situasi yang berbeda, terutama dengan terjadinya peristiwa Santa Cruz (1999) Timor Timur yang memasukkan RI masuk kedalam ‘jurang kecaman’ negara-negara Barat (termasuk AS).<sup>33</sup>

Kendatipun peristiwa Timor Timur menjadi sorotan dunia, namun pemerintahan Presiden Megawati tampaknya memahami bahwa soal kerja sama militer tersebut juga tergantung pada sejauhmana Indonesia dapat membangun kredibilitasnya sendiri. Pengadilan HAM Ad Hoc dalam kasus Timtim sampai pada Agustus 2001 belum digelar, setelah itu terjadi pula kekerasan terus menerus di Aceh, sehingga wilayah tersebut menambah daftar baru yang menjadi sorotan internasional. Kasus-kasus tersebut jelas cukup menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Megawati untuk melakukan pemulihan kerja sama militer Indonesia dengan Amerika Serikat.

Hal-hal tersebut cukup berdampak dan membuat pemerintah Amerika Serikat belum melakukan peninjauan kembali atas penghentian kerjasama pertahanan (sejak 2001), di mana hal tersebut pernah diberlakukan sejak tahun 1960. Demikian halnya dengan bantuan untuk pelatihan pun ditanggihkan karena militer di Indonesia dituduh melakukan pelanggaran HAM di Timtim pada masa jejak pendapat (1999). Ini juga menjadi dasar pertimbangan yaitu mengapa pemerintahan Presiden George Bush Jr dalam bantuannya pada 2002 lebih menekankan dana sejumlah 30 juta dollar AS terutama untuk pemberdayaan kualitas Polri yang profesional, mampu mendukung penegakan hukum, dan akhirnya demi tegaknya stabilitas sistem politik demokrasi di Indonesia. Dengan demikian Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden George Bush Jr tampak cukup bijaksana, karena Amerika masih mau memberikan bantuan untuk Polri tanpa harus tergantung penyelesaian masalah Timtim.

Menyangkut soal HAM tersebut, Menteri Luar Negeri AS Colin Powell menekankan bahwa pemerintahannya ingin memulihkan hubungan militernya dengan Indonesia setelah terwujudnya pembentukan pemerintahan

---

<sup>33</sup> Kompas 15 Agustus 2001, *Loc. Cit.*

baru Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun ditambahkan oleh Colin Powell bahwa AS masih tetap berhati-hati dalam isu pelanggaran hak-hak asasi (HAM) yang selama ini belum tuntas baik di Timtim maupun di Aceh.<sup>34</sup> Intinya Powel mengatakan bahwa: ‘kami ingin membina hubungan dengan militer Indonesia, tetapi kami juga ingin merasa puas bahwa masalah pelanggaran hak asasi itu sudah diselesaikan’.<sup>35</sup>

Sebagaimana diketahui Kongres AS memang sejak 1998 membatasi hubungan militer AS dengan Indonesia, dan hanya sebatas masalah kemanusiaan dan upaya menanggulangi bencana. Karena itu penjualan persenjataan kepada Tentara Nasional Indonesia masih dilarang. Larangan ini disponsori oleh anggota Demokrat dari Vermont, Patrick Leahy – yang melarang AS melatih tentara asing yang melanggar HAM.<sup>36</sup> Sikap maupun pernyataan Patrick tersebut bukanlah merupakan suatu sikap pribadi yang berlebihan. Karena kebanyakan negara Barat menanggukkan kerja sama militer dengan Indonesia, setelah pecah pertumpahan darah di Timor Timur tahun 1999, sewaktu di wilayah itu diadakan penentuan pendapat untuk melepaskan diri dari Indonesia.<sup>37</sup>

Australia sebagai pihak yang memimpin misi perdamaian internasional di Timor Timur (setelah dilakukan penentuan pendapat untuk kemerdekaan), minta agar AS khususnya terhadap pernyataan Menlu AS Colin Powell agar lebih berhati-hati dalam soal pembukaan kembali kerjasama militer antara Jakarta dan Washington.<sup>38</sup>

Kalau fakta maupun pernyataan Menlu AS Colin Powell tersebut dianalisis lebih jauh, maka hal-hal tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor domestik (kasus Timor Timur dan Aceh), terutama dalam hal sorotan HAM-nya dapat dikatakan tidak hanya sebagai faktor penghambat masa lalu yang dapat diabaikan begitu saja. Namun faktor HAM masa lalu tersebut perlu diperhitungkan, dan tidak dapat diremehkan, serta faktor-faktor tersebut dapat saja menjadi ‘batu-batu kerikil’ yang dapat mempersulit bahkan

---

<sup>34</sup> ‘AS Ingin Pulihkan Hubungan Militer dengan RI’, *Kompas* 30 Juli 2001.

<sup>35</sup> *Kompas* 30 Juli 2001, *Loc. Cit.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

menggagalkan diplomasi Presiden Megawati Sukarnoputri terhadap AS maupun negara-negara Barat yang umumnya juga amat peduli pada persoalan HAM khususnya.

Ini menunjukkan pula bahwa diplomasi keluar pada akhirnya ditentukan pula oleh hal-hal yang bersifat kredibilitas yang dapat dilakukan Indonesia di tingkat domestik. Di tambah pula diplomasi Indonesia terutama terhadap Amerika Serikat, sebagaimana di tekankan oleh Prof. Dr. Juwono Sudarsono jangan sampai melemahkan daya juang atau berbagai upaya yang sudah dilakukan; 'intinya bahwa berapa pun dollar AS yang diterima tidak akan ada gunanya bila melemahkan semangat juang untuk berdiri di atas kaki sendiri. Bahkan pesan tersebut pernah dikemukakan Soekarno di depan Kongres AS pada tahun 1955.<sup>39</sup>

Khususnya menyangkut sorotan HAM, dan memperhatikan pernyataan Menlu AS Colin Powell bahwa 'kami akan mendekati pemerintahan Presiden Megawati dengan sikap membantu, tetapi juga dengan sikap berhati-hati, dan kami hanya akan bergerak atas hal-hal yang sesuai dengan undang-undang kami.<sup>40</sup> Khususnya kami akan kembali ke Kongres untuk meminta agar undang-undang tersebut dimodifikasi atau ditiadakan, kendatipun kami tetap sensitif terhadap masalah dan isu-isu HAM.<sup>41</sup>

Berdasarkan pernyataan Menlu Powell tersebut tidak ada jaminan untuk sementara ini (2001—04) bahwa isu pelanggaran HAM yang dituduhkan pada pihak-pihak di TNI dalam kasus Timtim maupun Aceh dapat 'dihapus' begitu saja. Ini perlu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak di TNI, bahwa perubahan atas politik masa lalu (Perang Dingin, dan persaingan antar kekuatan blok Barat dan Timur) perlu diikuti dengan tindakan konkrit yang sifatnya tidak dapat lagi melakukan kebijakan apapun semena-mena dengan alasan keamanan. Berdasarkan hal tersebut maka reformasi TNI serta hubungan sipil dan militer di era Presiden Megawati tampaknya perlu dilakukan dengan serius.

---

<sup>39</sup> Kompas 15 Agustus 2001, *Loc. Cit.*

<sup>40</sup> Kompas 30 Juli 2001, *Loc. Cit.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

Agak berbeda dengan sikap Menlu AS Colin Powell, Menlu Australia Alexander Downer (yang sekaligus terlibat dalam pertemuan dengan Menlu AS tersebut dan Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld) tetap menghendaki AS untuk bersikap keras terhadap pemerintahan di Jakarta.<sup>42</sup> Hal tersebut terutama menyangkut pemulihan hubungan militer AS-Indonesia tidak mempermudah penjualan senjata, namun hanya terjadi transaksi atas penjualan sejumlah suku cadang untuk kebutuhan terbatas yang bersifat logistik.

Kontak pemulihan hubungan militer dengan Indonesia tidak hanya penting bagi Amerika saja, tetapi Australia pun demikian halnya. Namun sikap Australia sebagaimana ditekankan oleh Menlu Alexander Downer menekankan; 'bahwa penjualan senjata dan pelatihan militer seharusnya tetap dilarang sampai sudah ada bukti nyata bahwa militer Indonesia telah mengubah sikap brutal yang ditunjukkannya di Timor Timur, dan membuktikan kepatuhannya kepada pemimpin sipil yang dipilih secara demokratis.'<sup>43</sup>

Pada prinsipnya pemerintahan Presiden Megawati tampak cukup besar perhatiannya pada soal-soal yang menyangkut HAM, dan khususnya tetap akan menegakkan ratifikasi *core convention* HAM antara Indonesia-Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal tersebut antara lain; (A) Konvensi tentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (ratifikasi 1984). (B) Konvensi Hak Anak (ratifikasi 1990). (C) Konvensi pelarangan Pengembangan Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun serta Pemusnahannya, serta Konvensi Penghapusan dan Penghapusan Diskriminasi Rasial (masih dalam proses ratifikasi).<sup>44</sup>

Di samping memperhatikan poin-poin konvensi di atas, Indonesia khususnya di era Presiden Megawati menitikberatkan pada keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu faham HAM di Indonesia tidak bersifat individualistik. Indonesia juga mengakui bahwa HAM bersifat universal dan masyarakat internasional juga telah

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Kompas 30 Juli 2001, *Loc. Cit.*

<sup>44</sup> Laporan Kerjasama ASEAN dalam Upaya Menuju Terbentuknya Mekanisme HAM di ASEAN, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri, 2002, khusus Bab mengenai Indonesia, hal. 16-19.

mengakui dan menyepakati bahwa pelaksanaannya merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negara dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi serta faktor-faktor lainnya yang dimiliki bangsa tersebut... (termasuk Komnas HAM sudah dibentuk sejak 1993, dan diakui bahwa pelanggaran HAM serius justru terjadi di daerah seperti Aceh, Papua, Maluku dan Sulawesi Selatan).<sup>45</sup>

Dalam menanggapi pelanggaran HAM berat di Timor Timur, pemerintahan Presiden Megawati menekankan bahwa gagasan untuk membentuk *tribunal international* tidak ada dasarnya, dengan argumen bahwa sesuai dengan prinsip hukum internasional, suatu mekanisme internasional (*tribunal dan equity commission*) hanya berperan sebagai pelengkap bagi mekanisme nasional, yang hanya diterapkan apabila telah dilakukan ‘*exhaustion of national remedies*’ dan berdasarkan prinsip internasional, pengadilan internasional hanya dilakukan apabila tidak ada kemauan dan kemampuan dari negara yang bersangkutan untuk melakukan pengadilan yang fair dan efektif terhadap kasus-kasus yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional tersebut.<sup>46</sup> Upaya diplomasi untuk menyakinkan masyarakat internasional agar memberikan kepercayaan kepada pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus-kasus Timtim diperkuat dengan pembentukan KPP-HAM Timtim (22/09/1999), dan pembentukan pengadilan HAM ad hoc berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 96 tahun 2001, yang bertujuan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran berat HAM Timtim yang prosesnya masih berjalan...<sup>47</sup> Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Megawati cukup tanggap dalam mengikuti dan memperhatikan atas sorotan terhadap Indonesia – sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat internasional (pasca Perang Dingin).

Hal-hal yang termasuk pelanggaran HAM di wilayah Aceh dan sekitarnya (menurut *Human Rights NGO coalition*), tampaknya juga masih cukup memprihatinkan sampai tahun 2002. Dari data yang diperoleh masih

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Laporan Kerjasama ASEAN (2002), *Loc. Cit.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

terjadi peristiwa pembunuhan dengan jumlah total 2511 orang (1998-2002), selanjutnya mereka yang ditahan (1552 orang), dan mereka yang diperkirakan hilang (439 orang), serta mereka yang mengalami penyiksaan (2.969 orang), dan mengalami pemerkosaan (20 orang) dalam periode yang sama.<sup>48</sup> Kriteria pelanggaran HAM di Aceh yang tampaknya lebih serius dibandingkan dengan Timtim, ini menunjukkan bahwa Aceh dan wilayah sekitarnya demikian penting bagi kelanjutan eksistensi Indonesia secara umum. Intinya wilayah Aceh demikian penting bagi Indonesia, bukan hanya soal faktor historis dalam melawan penjajah Belanda – tapi posisinya demikian strategik bagi kepentingan ekonomi (minyak dan gas buminya) dan politik (menjadi bagian lambang wilayah kesatuan dengan sebutan dari Sabang sampai Merauke) Indonesia.<sup>49</sup>

Presiden Megawati yang menggantikan Abdurrahman Wahid pada bulan Juli 2001, dalam hal menghadapi perkembangan di Aceh juga tetap melanjutkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya dengan Keputusan Presiden NO. 7/2001. Keppres tersebut diberlakukan sejak September 2001 sampai dengan Pebruari 2002 dengan kebijakan rehabilitasi bidang ekonomi, sosial politik, budaya, hukum, dan keamanan. Khususnya beberapa perubahan dilakukan Presiden Megawati yaitu (A) dengan menghidupkan kembali Kodam Iskandar Muda (Pebruari 2002).<sup>50</sup> Hal tersebut tampaknya mengabaikan kritik dari banyak LSM dalam negeri maupun luar negeri, yang sekaligus memperkirakan bahwa Kodam Iskandar Muda diberi wewenang penuh untuk memonitor operasi-operasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dicurigai sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan para simpatisannya. Presiden Megawati agaknya mengutamakan jaminan keamanan yang lebih riil bagi kepentingan nasional Indonesia, daripada hanya mendengar kritik-kritik LSM selama ini yang justru dapat membuat TNI lengah atas tugas utamanya yaitu: menjamin keamanan bagi seluruh warganya di tanah Rencong tersebut.

---

<sup>48</sup> Adi Prasetyo, A. E. Priyono, Olle Tornquist (dkk), *Indonesia's Post Soeharto Democracy Movement*, Demos Publication, Jakarta, 2003, hal. 519.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Adi Prasetyo, A. E. Priyono, Olle Tornquist (2003), *Op. Cit.*, hal. 527.

Isu-isu HAM meliputi wilayah Timtim dan Aceh yang masih belum tuntas penyelesaiannya, muncul Bom Bali I (Oktober 2001) yang amat mengguncangkan dunia umumnya. Karena banyak pimpinan negara (John Howard dari Australia, Menlu Jerman Joscha Fischer, Perdana Menteri Inggris Tony Blair, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin) yang secara pribadi dan langsung mengancam peristiwa yang memakan korban 128 jiwa (umumnya warga Australia) tersebut, dan minta dunia untuk bersatu menghadapi terorisme yang menjadi momok abad ke 21.<sup>51</sup> Pemerintahan Presiden Megawati tampaknya dapat memahami kemarahan berbagai kepala pemerintahan tersebut, mengingat Bali dan wilayah pariwisatanya hanyalah sebuah ‘*soft target*’ (bukan daerah strategis secara militer dan pemerintahan) yang seharusnya bukan menjadi prioritas serangan teroris. Ternyata perkembangan dunia dan isu-isu terorisme dapat dikatakan masuk pada konteks perubahan – yang menempatkan *soft target* (hotel dan restoran) dapat sewaktu-waktu menjadi target pengeboman pihak teroris.

Kendatipun hubungan Indonesia-Amerika Serikat demikian penting, namun di era Presiden Megawati tersebut Indonesia tetap bersikap kritis terhadap negara tersebut terutama menyangkut perkembangan di Irak. Pada 4 September 2001 pemerintah Indonesia menegaskan sikapnya yang menolak sikap pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden George Bush Jr yang berencana melancarkan serangan terhadap Irak dengan alasan masih dikembangkannya senjata pemusnah massal. Sebenarnya kini sudah ada mekanisme verifikasi inspeksi senjata di bawah kendali Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKPBB).<sup>52</sup> Lebih jauh Menlu Hassan Wirajuda menegaskan penggunaan kekuatan bersenjata secara sepihak tidak hanya mengurangi kewenangan PBB, tetapi juga berpotensi mendestabilisasikan wilayah tersebut. Dalam menghadapi kasus Irak, Indonesia tetap menekankan perlunya menyelesaikan upaya damai dengan tetap menggunakan dan memperkuat mekanisme yang ada di PBB seoptimal mungkin.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> ‘Dunia Kecam Insiden Bali’, *Republika* 14 Oktober 2001.

<sup>52</sup> ‘RI Tolak Sikap Sepihak AS terhaap Irak’, *Suara Pembaruan* 5 September 2001.

<sup>53</sup> ‘Menlu Hassan Wirayuda, Invasi Sepihak Ancam Stabilitas Wilayah’, *Kompas*, 19 September 2001.

Hal lain yang turut mewarnai hubungan Indonesia-Amerika Serikat yaitu isu-isu disekitar terorisme. Isu tersebut sebaiknya tidak disalahtafsirkan oleh berbagai pihak di Indonesia yang intinya meremehkan soal kondisi yang sebenarnya yang berkaitan dengan terorisme (sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Presiden Hamzah Haz yang menyatakan bahwa terorisme di Indonesia tidak ada).<sup>54</sup> Hal tersebut dapat memberikan kesan pada pihak-pihak di pemerintahan Amerika Serikat, bahwa Indonesia kurang serius dalam menanggapi isu-isu terorisme. Lebih jauh menurut Dubes Indonesia untuk Amerika Soemadi Brotodiningrat, perang global melawan terorisme yang dilancarkan AS juga telah menimbulkan kesulitan politis di Indonesia, dan dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang masih dalam masa transisi.<sup>55</sup> Hal tersebut ditambah lagi dengan pernyataan bebrbagai pihak di dalam negeri (tokoh-tokoh agama) yang menekankan bahwa teorisme di Indonesia tidak ada. Hal ini dapat melunturkan kesepakatan yang sudah di ambil di tingkat kepala negara (Indonesia-Amerika) yang bertujuan untuk sepakat memerangi terorisme.<sup>56</sup>

Di samping soal terorisme, Presiden Megawati kembali mengingatkan bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dapat berpengaruh jika akumulasi rasa tidak puas dan tidak simpati kepada AS tidak dikelola dengan baik, dan hal tersebut dapat menjadi masalah besar.<sup>57</sup> Ungkapan Dubes Soemadi menyangkut isu terorisme global yang dapat membangkitkan radikalisasi Islam di mana pun dan soal rencana serangan AS ke Irak adalah hal-hal yang sensitif bagi hubungan AS-Indonesia. Ungkapan kekhawatiran Presiden Megawati tersebut di sampaikan kepada Wakil Menteri Luar Negeri AS James Kelly dalam pertemuannya dengan Presiden Megawati di Istana Negara Jakarta.

Lebih jauh Presiden Megawati akan terus mengikuti perkembangan dan rencana serangan AS ke Irak, dan Indonesia memutuskan membentuk tim evakuasi untuk melindungi 33.000 warga Indonesia di Timur Tengah, dan

---

<sup>54</sup> 'Soal Terorisme, Pernyataan Para Pejabat Indonesia Timbulkan Kesulitan Politis, *Kompas* 19 September 2002

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> 'Presiden Ingatkan Hubungan RI-AS', *Kompas* 18 Januari 2002.

jumlah itu belum termasuk warga yang sedang menunaikan ibadah Haji di Arab Saudi.<sup>58</sup> Presiden Megawati juga tampaknya khawatir kalau perang Irak mempunyai dampak politis di dalam negeri, dan akumulasi tidak puas dan kemarahan dapat menjadi masalah besar dan mempengaruhi ‘gelombang’ naik turunnya hubungan baik kedua negara.<sup>59</sup>

Selanjutnya, Wakil Menlu AS James Kelly dalam tanggapannya akan menyampaikan hal-hal yang menjadi prioritas dan perhatian Indonesia tersebut kepada Presiden AS George Bush Jr di Washington, Kelly selanjutnya juga mengucapkan selamat atas keberhasilan pemerintahan Presiden Megawati dalam membongkar kasus Bom Bali I dan menyangkut rencana penyelesaian soal Aceh.<sup>60</sup> Konteks interaksi diplomasi tersebut menunjukkan bahwa di samping hubungan kerjasama militer Indonesia dan Amerika Serikat cukup penting, namun dalam hal-hal yang menyangkut isu-isu kritis seperti soal kasus rencana serangan AS ke Irak dan terorisme global – Indonesia tampaknya tidak mau didikte begitu saja oleh AS. Ini merupakan hal penting bagi perkembangan hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam tahun 2002-03.

Dalam perkembangan hubungan Indonesia-Amerika Serikat pada era 2002-03 ditandai pula oleh sikap pemerintahan Presiden Megawati yang merasa tersinggung dan kecewa, karena ketentuan wajib lapor bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada atau berkunjung ke AS.<sup>61</sup> Ketentuan tersebut jelas dianggap diskriminatif dan melecehkan bangsa Indonesia. Belum diketshui dengan jelas mengapa Indonesia dimasukkan dalam daftar negara yang dicurigai AS sebagai sarang gerakan terorisme, dan tidak jelas pula mengapa Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang terkena wajib lapor tersebut.<sup>62</sup>

Pihak Deplu sendiri dengan keputusan pemerintah AS yang dianggap sepihak tersebut. Ketentuan wajib lapor bagi warga negara WNI di AS jelas mendiskreditkan bangsa Indonesia. Padahal Indonesia sedang serius

---

<sup>58</sup> Kompas 18 Januari 2003. *Loc. Cit.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> ‘Tentu Saja Indonesia Tersinggung atas Ketentuan AS’, *Kompas 20 Januari 2003.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

memerangi terorisme dengan menangkap pelaku aksi peledakan bom. Langkah penting Indonesia dalam memerangi terorisme tampaknya tidak mendapat apresiasi AS. Ketentuan wajib lapor hanya menimbulkan ketegangan yang dapat mengganggu penggalangan kerjasama dalam menghadapi ancaman terorisme global. Jelas sikap dan kebijakan AS tersebut merupakan tantangan serius bagi Indonesia dan hubungan kedua negara.

Kendatipun kunjungan Presiden Megawati Sukarno-putri ke Amerika Serikat telah membuahkan hasil, yaitu direalisirnya bantuan dari negara Paman Sam tersebut dalam bentuk pemberdayaan aparat Polri pada 2002, namun hubungan kedua negara sempat terganggu. Adanya gangguan maupun protes yang bersifat aksi dan reaksi tersebut, karena publik domestik di Indonesia tampaknya tidak benar-benar paham terutama menyangkut; apa sebenarnya tujuan Presiden Megawati ke Amerika tersebut. Hal tersebut sempat menimbulkan reaksi keras, berupa demonstrasi dan kecaman terhadap kedutaan Amerika di Jakarta, bahkan diisukan telah terjadi ancaman maupun 'sweeping' terhadap warga Amerika di berbagai tempat di wilayah ibu kota Jakarta.<sup>63</sup>

Polemik menyangkut reaksi atas kunjungan Presiden Megawati telah pula menimbulkan polemik dari Ketua MPR Amien Raies (2001), yang menilai bahwa wajarlah kalau banyak warga yang berdemonstrasi maupun mengecam kebijakan Amerika di Afghanistan misalnya.<sup>64</sup> Bahkan Amien lebih jauh menekankan bahwa tidak dapat melarang jika ada warga Indonesia yang akan pergi berjihad ke Afganistan, karena jihad itu sendiri sudah merupakan salah satu pokok ajaran agama.<sup>65</sup> Namun Amien juga menghimbau pada warga Indonesia untuk tidak asal pergi untuk berjihad begitu saja, tapi perlu dipikirkan dengan bijaksana terutama menyangkut medan wilayah Afganistan yang cukup riskan dan berbahaya.<sup>66</sup>

Menanggapi perkembangan tersebut, Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda telah memberitahu Pemerintah AS termasuk Menteri Luar Negeri

---

<sup>63</sup> 'Tak Ada Warga AS Yang Dapat Ancaman Fisik', *Harian Kompas 1 Oktober 2001*, Jakarta.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

AS Colin Powell bahwa tidak seorang pun warga AS di Indonesia yang mendapat ancaman fisik dari warga Indonesia.<sup>67</sup> Ditekankan oleh Menlu bahwa soal ‘*sweeping*’ tersebut hanya retorika belum sampai pada tindakan.<sup>68</sup> Dapat disimpulkan bahwa diplomasi Presiden Megawati terhadap Pemerintahan George Bush Jr yang terutama menekankan pada konteks adanya dinamika atas hubungan sipil dan militer di Indonesia, memang tidak mudah dan mendapat interpretasi yang sama dari warga Indonesia umumnya. Persetujuan Pemerintahan George Bush Jr dalam soal pemberian hibah pada Indonesia, ternyata terjadi pada waktu setelah tragedi WTC tersebut, sehingga publik domestik Indonesia lalu melakukan perkiraan yang tampaknya terlalu jauh – Indonesia diberikan bantuan hibah dan sekaligus mendukung rencana serangan Amerika ke Afganistan.

Konteks kunjungan maupun diplomasi yang dilakukan Presiden Megawati ke Amerika tampaknya lebih jauh perlu diperkuat dengan berbagai penjelasan yang transparan dan langsung pada publik domestik. Karena isu gerakan anti teroris yang diprakarsai oleh Presiden George Bush, dan perkembangan di Afganistan maupun di Irak adalah hal-hal yang amat sensitif bagi bangsa Indonesia. Hal ini juga tidak lain karena selama ini Amerika Serikat juga selalu menunjukkan 2 sikap dominannya di Timur Tengah yaitu; sikap yang arogan dan *double standard*. Hal-hal tersebut sudah menjadi gejala umum di Timur Tengah dalam kaitannya koalisi kuat AS-Israel menghadapi berbagai negara seperti Iran maupun Irak di era Saddam Husein. Indonesia maupun diplomasinya terhadap Amerika Serikat pada akhirnya perlu mempertimbangkan berbagai implikasi yang tidak dapat diabaikan dan terkait dengan kebijakan luar negeri negara Paman Sam tersebut di berbagai wilayah lainnya.

Selanjutnya Presiden Megawati juga menambahkan dalam konteks diplomasi maupun hubungan Indonesia-Amerika Serikat, dan kaitannya dengan terorisme dan rencana serangan Amerika ke Afganistan, ‘bahwa tidak bisa dan tidak boleh seseorang atau sekelompok orang atau bahkan pemerintah sekalipun dengan dalih mencari atau menangkap pelaku kekerasan lantas

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

begitu saja menyerang suatu bangsa atau negara lain'.<sup>69</sup> Kritik terhadap Presiden Megawati tampaknya memang tidak mudah surut begitu saja. Hal tersebut Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY,2001) ikut menambahkan soal diplomasi maupun proses negosiasi yang dilakukan Presiden Megawati dengan Amerika Serikat belum lama ini, ditegaskan' bahwa SBY minta seluruh warga negara Indonesia memahami bahwa tidak ada yang kosong dalam langkah diplomasi dan langkah-langkah pemerintah kita dalam rangka menyikapi perkembangan dunia sekarang ini.<sup>70</sup>

SBY lebih jauh menekankan bahwa Indonesia bersikap independen (tidak terikat atau ditentukan oleh AS, dalam diplomasi maupun kebijakan luar negerinya, interpretasi penulis). Khususnya Indonesia sedang mengolah untuk bagaimana dapat mengajukan proposal, seruan, desakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar sekaranglah saatnya untuk mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk mencegah, melebar, dan meluasnya medan konflik di Afghanistan.<sup>71</sup> Ditambahkan pula bahwa Indonesia dapat berkomunikasi dengan Mesir, Pakistan, Saudi Arabia, PBB bahkan perundingan bilateral lebih lanjut dengan Amerika Serikat dapat saja dilakukan setiap saat.

Terkait dengan diplomasi dan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat menjelang akhir 2001, telah mendapat reaksi langsung dari Menteri Luar Negeri Colin Powell yang berkunjung ke Jakarta awal Oktober 2001. Powell menekankan bahwa hubungan antar kedua pemerintahan tidak mengalami gangguan apa-apa sebagai akibat gencarnya demonstrasi dan berbagai respon warga Indonesia umumnya, Menlu Powell justru dalam kunjungannya kali ini makin mempertegas niatnya untuk menghidupkan kembali program *International Military Education and Training* (IMET), dan melakukan pertukaran perwira TNI ke Amerika Serikat.<sup>72</sup>

Dalam kunjungannya tersebut Menlu Colin Powell menekankan beberapa hal yang menyangkut peningkatan profesionalisme militer di

---

<sup>69</sup> 'Soal Pernyataan Mega, Tunggu Respons AS, RI Ingatkan Forum APEC Bukan Bahas Politik', *Harian Republika*, 18 Oktober 2001. Jakarta.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> 'Antara Gaya dan Substansi dalam Kunjungan Menlu AS', *Kompas* 3 Oktober 2001, Jakarta.

Indonesia; (A) Amerika Serikat ingin meningkatkan kemampuan polisi menanggulangi kerawanan-kerawanan, dan menawarkan latihan bagi polisi untuk menangani terorisme.<sup>73</sup> (B). Amerika Serikat juga menjanjikan bantuan 50 juta dollar AS lebih kepada Indonesia untuk membantu militer memberantas terorisme, dari jumlah tersebut – 47 juta dollar AS akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan polisi dan sisanya sejumlah 4 juta dollar AS untuk penggunaan dana latihan militer.<sup>74</sup>

Kritik atas bantuan Amerika Serikat itupun dapat ditafsirkan sebagai bentuk campur tangan negara tersebut terhadap masalah dalam negeri Indonesia, namun ada pula yang berpendapat bahwa melihat postur perlengkapan militer Indonesia yang memprihatinkan sejak embargo suku cadang – maka pemulihan kerjasama militer Indonesia dan Amerika Serikat sebagai suatu hal yang tidak dapat dihindarkan.<sup>75</sup> Kedua negara sama-sama memiliki kepentingan, Indonesia dengan wilayah lautnya yang luas dan dalam bentuk kepulauan jelas membutuhkan peningkatan dan pembaruan teknologi militer yang canggih dan moderen khususnya bagi divisi Angkatan Laut.<sup>76</sup>

Di pihak lain, Amerika Serikat menginginkan agar Indonesia berperan dalam memerangi terorisme tentu dengan cara Indonesia sendiri.<sup>77</sup> Respon AS tersebut dapat dikatakan sebagai faktor *intervening variable* bagi upaya pembenahan hubungan sipil-militer, dan modernisasi serta profesionalisasi TNI dan Polri khususnya, sehingga berbagai kebijakan yang terkait dengan profesionalisasi TNI Polri dan pembangunan demokrasi politik dapat dikatakan ‘tertolong’ karena adanya kepentingan yang sama dari Amerika Serikat agar Indonesia memang dapat memperkuat pertahanan keamanannya. Di mana hal tersebut tidak semata-mata karena adanya perubahan internal di Indonesia (era reformasi sejak 1999), tetapi juga karena ada tuntutan lainnya yang bersifat global – yaitu antisipasi terhadap kerawanan keamanan (bahaya gerakan terorisme) yang bersifat mendunia.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

Dalam perkembangan selanjutnya (2002), Amerika Serikat tampaknya puas dan mendukung sepenuhnya reformasi TNI yang sedang berjalan di bawah pemerintahan Presiden Megawati tersebut. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Asisten Deputy Menteri Pertahanan AS untuk Wilayah Asia-Pasifik, Peter TR Brookes menilai bahwa TNI telah menjalankan reformasi sesuai dengan arah yang benar.<sup>78</sup> Karena itu Amerika Serikat menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan reformasi di tubuh TNI.<sup>79</sup>

Peter TR Brookes lebih jauh menyarankan; 'agar TNI melakukan publikasi secara luas mengenai hal-hal apa yang sudah dan sedang dilakukan TNI, karena selama ini banyak negara di dunia yang belum mengetahui apa yang telah dan sedang dilakukan dalam reformasi TNI.'<sup>80</sup> Hal ini diperlukan terutama untuk mendapatkan pengertian dan dukungan internasional bagi Indonesia.<sup>81</sup> Kunjungan delegasi dari Departemen Pertahanan AS tersebut juga melakukan berbagai bahasan menyangkut masalah pertahanan dan keamanan kedua negara, yang juga meliputi situasi keamanan regional, kebijakan keamanan nasional, perompakan, reformasi militer TNI, kebijakan *counter-terrorism* regional, dan proses budget anggaran militer.<sup>82</sup>

Dari interaksi langsung antar pihak-pihak Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwa diplomasi yang dilakukan pemerintahan Presiden Megawati menyangkut profesionalisasi militer dan demokrasi terus bergulir, dan mendapat tanggapan langsung dari pihak-pihak yang memang berkompeten terhadap isu reformasi militer dan Indonesia. Komentar maupun pendapat yang disampaikan oleh Brookes sebagai pimpinan delegasi Departemen Pertahanan AS juga memperlihatkan, bahwa Amerika Serikat cukup memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi Indonesia pasca Krisis 1998 tersebut. Karena itu Amerika Serikat cukup beralasan kalau ada kekhawatiran bahwa reformasi TNI akan sulit diwujudkan ataupun direalisasikan di era pemerintahan Presiden Megawati sebagai akibat krisis yang bersifat multidimensional, dan

---

<sup>78</sup> 'AS Mendukung Penuh Reformasi TNI', *Kompas*, 26 April 2002. Jakarta.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

berkepanjangan. Keluar dari kemelut krisis tersebut dan ketegasan pemerintahan Presiden Megawati untuk tetap melaksanakan reformasi militer/TNI, tampaknya memang pantas mendapat perhatian maupun dukungan positif dan optimal dari berbagai pihak di lingkungan pemerintahan Amerika Serikat.

Pihak-pihak yang tergabung dalam delegasi Departemen Pertahanan Amerika tersebut juga mengakui bahwa realisasi kerjasama militer secara langsung masih dalam proses negosiasi menuju pada 'suatu peninjauan kembali'. Hal ini disebabkan karena Kongres Amerika Serikat melalui *Leahy Amendment* menunda bantuan dan latihan militer dengan Indonesia sejak tahun 1999, sebagai akibat tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.<sup>83</sup> Pencairan terhadap kerjasama militer antar kedua negara sangat tergantung pada penilaian Amerika Serikat terhadap penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur. Pencabutan embargo bukan kewenangan pihak eksekutif sebab hal itu merupakan keputusan Kongres AS yang harus dilaksanakan oleh eksekutif. Karena itu eksekutif tidak berada pada posisi yang memiliki kewenangan mencabut embargo.<sup>84</sup>

Dengan kasus embargo tersebut, pihak Indonesia khususnya Mayjen Sudrajat mengakui bahwa embargo AS mengakibatkan menurunnya kemampuan tempur TNI karena keterbatasan peralatan suku cadang, dan persenjataan jenis *lethal weapon* (senjata mematikan).<sup>85</sup> Namun Mayjen Sudrajat tidak dapat menyebutkan persentase penurunannya, karena menyangkut *manouvre capability* dan *service capability* dari masing-masing kekuatan tempur termasuk peralatannya.<sup>86</sup> Menyangkut hal-hal tersebut dan dinamika kebijakan hubungan militer Indonesia-AS, di Surabaya – Korps Marinir TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan *US Marine Corps* (Korps Marinir AS) melaksanakan seminar bertema 'Penggunaan Senjata Tanpa Mematikan. Dalam seminar tersebut tampaknya diharapkan dapat terjadi tukar menukar dan pengalaman yang lebih dalam antar kedua korps marinir

---

<sup>83</sup> *Kompas*, 26 April 2002, *Loc. Cit.* Lihat Juga 'Indonesia-AS Bahas Arah Kebijakan Hubungan Militer', *Kompas*, 25 April 2002, Jakarta.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

Indonesia-AS. Ini satu bukti lagi bahwa diplomasi Indonesia terhadap Amerika Serikat dalam kasus profesionalisasi dan dukungan terhadap reformasi militer/TNI di Indonesia bersifat '*multi-track diplomacy*'. Alhasil semua pihak yang terkait, tampaknya amat berkepentingan untuk saling melakukan interaksi maupun negosiasi timbal balik antar Indonesia dan Amerika Serikat.

Reaksi maupun pujian terhadap Presiden Megawati atas reformasi internal terhadap TNI, maupun pada kasus prosekusi atas 3 jenderal yang terlibat dalam peristiwa Timor Timur 1999 menunjukkan kemajuan yang patut dihargai. Hal tersebut dan menyangkut kemajuan yang dicapai Presiden Megawati juga muncul sebagai *head-line* berita, antara lain *Megawati makes progress; 'The Megawati government has at last begun to address one of the key conditions for better relations with the United States and other Western countries by beginning the prosecution of 18 officials, including three army generals, for crimes committed in East Timor during its 1999 move to independence'*.<sup>87</sup>

Namun perkembangan domestik sendiri yang banyak ditandai oleh kasus-kasus separatis dan teror di Maluku Utara, Poso, maupun Bom Bali I, peristiwa tersebut tampaknya cukup mengganggu hubungan Indonesia-Amerika Serikat khususnya. Pihak-pihak di pemerintahan George Bush Jr mempertanyakan apakah Presiden Megawati dapat bertindak tegas dan sekaligus memberantas aksi-aksi teror tersebut. Keraguan terhadap Presiden Megawati tersebut oleh pihak Amerika Serikat, ini tidak lain karena Megawati diperkirakan tidak dapat bertindak tegas terutama kalau berhadapan dengan pihak-pihak dari partai politik Islam maupun para pemimpin Islam umumnya. Dalam konteks tersebut dinyatakan dalam suatu pemberitaan pers di Amerika Serikat; *'Megawati hesitates to take more decisive steps for fear of undermining her own government, which depends on the support of Islamic political movements. The same concerns make her reluctant to accept the sort*

---

<sup>87</sup> 'Megawati Makes Progress', *the International Herald Tribune*, 23 Maret 2002, Washington, USA.

*of direct U.S. military support – that now going to the neighboring Philippines.*<sup>88</sup>

Isu separatisme dan aksi-aksi teror tampaknya menjadi hal yang dominan, bahkan dapat dikatakan menjadi sorotan baru yang cukup serius baik dari Amerika Serikat maupun negara-negara Barat lainnya. Perkembangan isu tersebut tampaknya merupakan tantangan baru bagi pemerintahan Presiden Megawati. Pihak Amerika maupun negara Barat lainnya seperti Australia cukup mengkhawatirkan jika visi pemerintahan Megawati yang pada awalnya akan melakukan reformasi militer/TNI, namun dalam pelaksanaannya; (A) fokusnya terpecah karena adanya aksi-aksi teror maupun gerakan separatis yang cukup mengganggu konsentrasi kebijakan reformasi tersebut. (B). Aksi teror maupun gerakan separatis tersebut juga dikhawatirkan adanya oknum-oknum TNI yang justru turut andil membuat peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut sulit dipadamkan, dan terus bergulir, sehingga pihak Amerika maupun negara Barat umumnya melihat hal-hal tersebut sebagai tantangan yang cukup serius bagi Presiden Megawati. Kekhawatiran tersebut terutama menyangkut 'kurang solidnya' TNI menghadapi berbagai isu reformasi, disebabkan siapa yang menjadi tokoh andalan Presiden Megawati agar TNI khususnya tidak bergejolak dan turut memanfaatkan situasi domestik Indonesia yang sedang dilanda aksi teror dan gerakan separatisme pasca 1999?

Reaksi maupun inisiatif yang dilakukan pihak Amerika Serikat diakui oleh Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil, bahwa di tingkat intern (domestik) belum banyak dilakukan.<sup>89</sup> Hal ini menjadi konsekuensi perkembangan situasi domestik yang masih dilanda era reformasi, diikuti dengan berbagai tantangan baru yang dapat dikatakan sebagai implikasi terorisme global (2002). Menhan Abdul Djalil lebih jauh menekankan bahwa posisi Indonesia dalam hal terorisme internasional sama dengan masyarakat internasional, yang intinya telah bertekad bulat memerangi terorisme.<sup>90</sup> Pernyataan tersebut sekaligus menyangkal tuduhan Menteri Senior Lee Kuan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> 'Soal Terorisme Internasional, Menhan Akui Belum Banyak yang Dilakukan', *Kompas 11 Februari 2002*, Jakarta.

<sup>90</sup> *Ibid.*

Yew; ‘yang menilai Indonesia merupakan sarang teroris, sebagai reaksi atas hal itu Departemen Luar Negeri telah melakukan protes dan ‘teguran’ serta memanggil Dubes Singapura – yang pada intinya keberatan dengan pernyataan tersebut.<sup>91</sup>

Dalam kaitan itu Indonesia melakukan kerjasama dengan negara manapun, antara lain berbagai kesepakatan kerjasama yang sudah dilakukan dengan Amerika Serikat, Australia, maupun dengan ASEAN – dalam hal tukar menukar informasi intelijen. Pada prinsipnya menurut Menhan Matori Abdul Djilil ‘Indonesia perlu menajamkan mata maupun telinga untuk mendeteksi kemungkinan adanya terorisme perdagangan senjata gelap, dan lain-lain.<sup>92</sup> Dari perkembangan konteks terorisme internasional, tampaknya reformasi hubungan sipil-militer menjadi bertambah beban tantangannya di tingkat domestik. Indonesia dalam hubungan itu telah menemukan dokumen rencana serangan ke Kedubes Amerika Serikat baik di Jakarta maupun di Singapura dan Malaysia.<sup>93</sup> Ini merupakan suatu keprihatinan bagi ASEAN umumnya, karena situasi ekonomi yang masih dilanda resesi dan pada saat bersamaan harus pula menghadapi berbagai ancaman teror.

Diakui oleh Menlu Hassan Wirayuda bahwa Indonesia (2002) mendapat tekanan kuat dari Amerika Serikat dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, agar segera menumpas sejumlah gerakan militan.<sup>94</sup> Dunia khawatir menganggap Indonesia yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini menghadapi guncangan radikal, dan ada satu kecenderungan dalam berita-berita regional dan internasional yang menunggu terutama tindakan apa yang dilakukan Indonesia selanjutnya, demikian pernyataan Menlu Hassan Wirayuda.<sup>95</sup>

Pada tahun awal 2003 diplomasi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Megawati cukup disibukkan dengan rencana penyerangan Amerika Serikat terhadap Irak. Ambisi Amerika tersebut terkait dengan isu adanya penyebaran senjata kimia dan biologis atau disebut sebagai ‘*Weapon of Mass-*

---

<sup>91</sup> ‘Deplu Panggil Dubes Singapura’, *kompas 17 Februari 2002*, Jakarta.

<sup>92</sup> *Kompas 11 Februari 2002, Loc. Cit.*

<sup>93</sup> ‘Indonesia Temukan Dokumen Rencana Serangan ke Kedubes AS’, *Kompas 12 Februari 2002*.

<sup>94</sup> ‘RI Tangani Terorisme dengan Cara Sendiri’, *Kompas 21 Februari 2002*, Jakarta.

<sup>95</sup> *Ibid.*

*Destruction*' (WMD) dalam jumlah yang sulit dideteksi oleh pihak-pihak di Amerika maupun negara Barat umumnya. Tuduhan Amerika terhadap WMD Irak maupun terhadap rezim Saddam Hussein tidak mengurangi sikap independensi Presiden Megawati yang tetap menginginkan agar soal Irak-Saddam Husein-dan WMD diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku di PBB.<sup>96</sup> Intinya masalah Irak harus diselesaikan secara damai. Hal yang hampir senada juga disampaikan oleh tokoh Partai Kebangkitan Bangsa dan mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab (di era pemerintahan Abdurrahman Wahid), yang menginginkan krisis Irakn diselesaikan dengan mengganti rezim Saddam Husein, dan pihak Barat dapat langsung melucuti WMD Irak kalau hal tersebut memang terbukti masih dimiliki negara tersebut.<sup>97</sup> Shihab lebih jauh dapat memahami bahwa pihak-pihak di pemerintahan Amerika Serikat saat ini dapat dikatakan sudah kehilangan kepercayaan terhadap Saddam Husein dan pemerintahannya, namun Shihab tetap menekankan pada Perdana Menteri Australia John Howard –agar hal-hal yang menjadi pendapat pihak-pihak di Indonesia tersebut dapat disampaikan pada Presiden Amerika George Bush Jr.<sup>98</sup>

Sikap independensi Indonesia dalam kasus Krisis Irak tampak jelas, bahwa pada prinsipnya Indonesia menentang rancangan resolusi perlucutan senjata kedua usulan Amerika Serikat yang diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB. Karena menurut Menlu Hassan Wirayuda alasan Amerika Serikat untuk mengajukan resolusi tersebut dinilai lemah dan seperti 'dibuat-buat', 'dasar rancangan resolusi itu karena Irak tidak mau memanfaatkan waktu yang diberikan untuk memusnahkan senjata-senjata kimia dan biologisnya.<sup>99</sup>

Indonesia tetap menginginkan tim inspeksi PBB diberi kesempatan memeriksa semua tempat yang diduga menyimpan senjata pemusnah massal. Posisi Indonesia sama dengan negara Gerakan Nonblok (GNB) dan Konferensi Negara Islam (OKI), oleh karena itu Indonesia tetap berkeyakinan

---

<sup>96</sup> 'Megawati-Howard Sependapat Selesaikan Masalah Irak Lewat PBB', *Kompas* 16 Februari 2003, Jakarta.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> 'Indonesia Menentang Resolusi AS', *Republika* 8 Maret 2003, Jakarta..

bahwa tidak perlu melakukan tindakan di luar keputusan Dewan Keamanan PBB. Sikap Indonesia tersebut menunjukkan independensi politik luar negerinya, yang tampaknya tetap bebas dalam melakukan responnya terutama terhadap sikap Amerika Serikat dalam hal kasus Krisis Irak tersebut. Hal tersebut makin dibukikan Indonesia yaitu dengan makin meningkatnya tekanan Amerika Serikat yang ingin segera melakukan kebijakan intervensinya di Irak, Indonesia tetap mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan sidang darurat.<sup>100</sup> Menanggapi ultimatum Presiden Amerika George Bush atas rezim Saddam Hussein di Irak yang harus segera angkat kaki, dinilai oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono sebagai meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut dan dapat memicu kemungkinan aksi kekerasan yang dahsyat ke seluruh penjuru Timur Tengah.<sup>101</sup>

Pemerintah Amerika Serikat memandang penentangan pemerintah Indonesia atas serangan Amerika Serikat ke Irak merupakan pendirian yang harus dihargai. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Ralp L. Boyce menyatakan; 'Kami memahani alasan dan prinsip ketidaksetujuan Indonesia atas langkah yang diambil pemerintah kami'.<sup>102</sup> Perbedaan pendapat tersebut tampaknya menjadi resiko yang harus dihadapi oleh pemerintahan Presiden Megawati, dan diharapkan tidak menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit di kemudian hari.

Hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat tampaknya sudah memasuki taraf yang kokoh, sehingga tak dapat begitu saja dirusak hanya karena terjadi perbedaan pendapat soal Irak. Pihak Amerika memahami adanya ketidak-kesepakatan, dan hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Boyce juga menekankan bahwa kita tidak dapat berbeda pendapat sepanjang dalam suasana persahabatan dan sikap saling menghargai.<sup>103</sup> Suasana tersebut tampaknya menjadi perhatian penting, dan tercermin dari sikap Indonesia dalam melakukan aksi-aksi yang berlangsung damai, ini

---

<sup>100</sup> 'RI Desak DK PBB Sidang Darurat, *Republika 19 Maret 2003*, Jakarta.

<sup>101</sup> *Republika 19 Maret 2003*, Jakarta., *Loc. Cit.*

<sup>102</sup> 'AS Hargai Sikap RI', *Suara Pembaharuan*, 12 April 2003, Jakarta.

<sup>103</sup> *Ibid.*

menjadi fakta demokrasi dalam kehidupan dunia yang makin kompleks, demikian Dubes Boyce menambahkan.<sup>104</sup>

Tampaknya baik Indonesia maupun Amerika Serikat saling memahami bahwa banyak aspek dari hubungan bilateral yang harus dilindungi, dan dikembangkan agar situasi yang terjadi belakangan ini (2003), tidak mengancam relasi maupun berbagai kesepakatan yang sudah ada selama ini. Amerika Serikat pada prinsipnya akan tetap mendukung proses demokrasi di Indonesia, dan terus menyalurkan bantuan ekonomi dan mendukung integritas wilayah Republik Indonesia, dan bantuan yang berjalan selama ini akan tetap terus berlanjut.<sup>105</sup>

Selanjutnya adanya perbedaan pendapat Indonesia-Amerika Serikat dalam soal Krisis Irak tersebut, justru membuat hubungan kedua negara menjadi semakin dewasa, dan semakin memahami serta masing-masing pihak tetap perlu menjaga hubungan bilateral tersebut dengan baik. Sebagaimana diketahui sesaat setelah serangan Amerika Serikat ke Irak pada 20 Maret 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri menyatakan pemerintah dan rakyat Indonesia mengecam keras tindakan Amerika Serikat tersebut dan sekutunya yang akhirnya memutuskan melakukan penyerbuan atas Irak.<sup>106</sup>

Lebih jauh Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggelar sidang darurat guna segera mengakhiri serangan Amerika Serikat ke Irak tersebut. Presiden George Bush Jr berkali-kali menelpon Presiden Megawati terutama setelah Indonesia mengecam tindakan Amerika tersebut – Indonesia jelas tidak akan berpartisipasi dalam pembangunan kembali Irak pasca perang, dan aksi militer sepihak Amerika merupakan tindakan agresi yang bertentangan dengan hukum internasional.<sup>107</sup>

Dari pembahasan bab III ini tampak jelas terjadinya dinamika hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat (2001-2003). Di samping itu berbagai isu dominan yang mewarnai hubungan bilateral kedua negara tidak selalu terfokus pada isu-isu reformasi politik sipil-militer di Indonesia.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Suara Pembaharuan, 12 April 2003, *Loc. Cit.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

Berbagai isu-isu penting lainnya seperti kasus aksi teror, gerakan separatisme, dan soal Irak tampaknya menjadi hal-hal lainnya yang sedikit banyak berpengaruh terhadap isu utama yaitu perlunya dukungan Amerika terhadap reformasi TNI di Indonesia. Dinamika hubungan kedua negara menunjukkan bahwa independensi kebijakan luar negeri Megawati terhadap Amerika Serikat, dan dalam kasus Irak khususnya ternyata mendapat perhatian, dan hal tersebut dapat dipahami sebagai suatu konsekuensi perbedaan pendapat dalam era demokrasi yang perlu dihargai oleh kedua belah pihak

